PRAKTEK DINASTI POLITIK PADA PILKADA SERENTAK JAWA TENGAH TAHUN 2020

Agus Riyanto¹, Yulita Nilam Fridiyanti², Joko Juli Prihatmoko³

Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: mr.gusryanto@gmail.com¹ yulitanilam95@gmail.com²
jokopri_smg@yahoo.com³

ABSTRAK

Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik menjadi tantangan dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia baik pada tingkat lokal maupun nasional. Adapun ciri dari politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh kelompok keluarga. Fenomena tersebut dapat menjadi bahan pemikiran bersama terutama para elite dan pemangku kepentingan dengan cara mengedepankan solusi alternatif yang merujuk pada aturan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan praktek dinasti politik pada pilkada serentak Jateng tahun 2020. Dengan memahami fenomena secara holistik dengan metode deskripsi kualitatif, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) calon yang terindikasi terkait dengan dinasti politik pada pilkada serentak Jateng 2020. Keberadaan dinasti politik tersebut tidak lepas dari tiga faktor: pertama, regulasi pilkada khususnya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33/PUU-XIII/2015; kedua, kegagalan partai politik memproduksi kader; ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek politik dinasti. Dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia akan terus berlangsung ke depannya sampai munculnya “political will” dari pemerintah maupun DPR untuk membuat regulasi baru untuk membatasi praktek dinasti politik. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan. Di sisi lain juga perlu adanya kesepahaman para hakim Mahkamah Konstitusi terkait regulasi pembatasan dan pengaturan praktek dinasti politik yang bertujuan untuk melindungi demokrasi lokal dan bukannya untuk melarang hak berpolitik seseorang untuk berkontestasi dalam pilkada.

Kata Kunci: *Dinasti Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik*

ABSTRACT

This article aims to explain the practice of political dynasties in the 2020 Central Java simultaneous regional elections. By understanding the phenomenon holistically using qualitative description methods, the results of the research show that there are 10 (ten) candidates who are indicated to be related to political dynasties in the 2020 Central Java simultaneous regional elections. The existence of political dynasties This cannot be separated from three factors: first, regional

election regulations, especially after the decision of the Constitutional Court (MK) Number 33/PUU-XIII/2015; second, the failure of political parties to produce cadres; third, society's permissive attitude towards the practice of dynastic politics. Political dynasties in the implementation of simultaneous regional elections in Indonesia will continue in the future until the emergence of "political will" from the government and the DPR to create new regulations to limit the practice of political dynasties. On the other hand, there is also a need for agreement among Constitutional Court judges regarding regulations limiting and regulating the practice of political dynasties which aims to protect local democracy and not to prohibit someone's political rights to contest regional elections.

Keywords: *Political Dynasty, Regional Head Election, Political Party*

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang diselenggarakan di Indonesia sejak era reformasi sebenarnya dimaksudkan untuk mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal. Melalui pilkada langsung masyarakat diharapkan memiliki otonomi politik untuk menentukan pemimpinnya yang dianggap kredibel dan amanah untuk membawa kemajuan daerahnya. Namun demikian dalam prakteknya banyak terdapat “anomali” yang bertolak belakang dengan tujuan mulia tersebut, salah satunya berkembang dinasti politik, ada yang menyebut juga sebagai politik kekerabatan.

Pada dasarnya diselenggarakannya pemilu dan pilkada sebagai upaya untuk orang-orang terbaik yang diusung oleh partai politik maupun jalur perorangan dengan harapan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, moralitas, dan peduli terhadap kepentingan masyarakat. Pemilu dan

pemilukada idealnya terhindar dari praktik politik dinasti yang lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan, persekongkolan kelompok yang akan menutup ruang gerak bagi kader partai untuk turut serta berkompetisi dalam kontestasi politik. Fenomena politik dinasti ini dipandang sebagai ketidakberhasilan pendidikan politik dalam melahirkan kader-kader dari internal partai untuk mampu memimpin di berbagai tingkatan dari pusat sampai ke tingkat daerah.

Politik dinasti juga merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan dan seringkali menjadi perdebatan publik di tengah masyarakat. Fenomena ini terkesan membatasi hak politik seseorang untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan akan membuat masyarakat menjadi apatis dan cenderung alergi untuk menentukan sikap politik dalam hal memilih pemimpin kredibel yang memiliki posisi penting dan strategis dalam

pemerintahan. Praktek dinasti politik sudah muncul sejak pilkada langsung digelar tahun 2005 dan semakin marak pada pilkada serentak 2020. Berdasarkan data Lembaga Riset Nagara Institute terdapat 124 kandidat yang terafiliasi dengan dinasti politik pada pilkada serentak 2020 yang meliputi: 57 calon bupati dan 30 calon wakil bupati; 20 calon walikota dan 8 calon wakil walikota; serta calon gubernur dan 4 calon wakil gubernur. Dari total 124 kandidat tersebut yang

menarik adalah 57 perempuan dan 29 merupakan istri dari kepala daerah sebelumnya. Sedangkan di Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2020 tercatat ada 10 calon yang memiliki keterkaitan dengan dinasti politik (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020). Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk memaparkan sebuah kajian tentang “Bagaimana Praktek Dinasti Politik pada Pilkada Serentak Jawa Tengah Tahun 2020?”.

KAJIAN PUSTAKA

Ada banyak kajian tentang dinasti politik pada kontestasi pilkada di Indonesia misalnya Agustino (2010), Djati (2013), Fitriyah (2020), dan Syauket (2021). Agustino dalam artikelnya yang membahas dinasti politik di Banten menyatakan bahwa logika politik kekeluargaan telah menjadi rasionalitas elite politiknya sehingga mendorong berkembangnya dinasti politik di provinsi tersebut dan tidak mengarahkan ke terwujudnya sistem politik yang demokratis (Agustino : 2010). Dengan menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik di tingkat lokal, Djati mengatakan bahwa gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari kebijakan penguasa mengangkat saudaranya merupakan upaya untuk menutupi aib kekuasaannya. Familisme ini dipengaruhi berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme, dan

feodalisme (Djati : 2013). Sementara Fitriyah menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik partai politik dalam kontestasi pilkada lebih cenderung memberi ruang lebar bagi calon yang memiliki background dinasti (Fitriyah : 2020). Sedangkan Syauket dalam analisisnya mengenai fenomena dinasti politik pada pilkada serentak tahun 2020 menyimpulkan bahwa dinasti politik terbentuk melalui orang kuat yang bertransformasi sebagai Local Bossism dan kemudian memperkuat oligarki politik dengan tujuan melanggengkan kekuasaan (Syauket : 2021). Artikel ini selanjutnya akan membahas praktek dinasti politik pada kontestasi pilkada serentak di Jawa Tengah tahun 2020 dengan asumsi bahwa maraknya dinasti politik tidak lepas dari aspek kelembagaan yaitu adanya regulasi yang longgar serta perilaku elit politik yang lebih mengedepankan orientasi kekuasaan pribadi atau keluarga.

Penelitian artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moeleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena secara holistik dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan beragam metode alamiah (Moelong : 2014). Dalam hal ini penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Data penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen dari buku-buku, jurnal, surat kabar atau media online yang membahas topik mengenai fenomena dinasti politik pada pilkada di Indonesia khususnya pada daerah di Provinsi Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dinasti Politik

Mengacu pendapat Susanti dinasti politik dan politik dinasti merupakan dua hal yang berbeda. Dinasti politik adalah sistem pewarisan kekuasaan berdasarkan hubungan darah dan keturunan yang berasal dari hanya beberapa elit, sementara politik dinasti adalah upaya mengarahkan suksesi

METODE

kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu (contohnya keluarga elite) dengan tujuan memperoleh atau mempertahankan kekuasaan (Susanti : 2017).

Sementara itu Djati menjelaskan dinasti politik dengan konsep familisme sebagai budaya politik yaitu sikap ketergantungan terhadap ikatan keluarga yang memosisikan keluarga dan ikatan kekeluargaan dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan kewajiban sosial lainnya (Djati : 2013). Dengan mengutip Garzon, menurut Djati konsep familisme di kasus Eropa Pertengahan berbeda dengan negara-negara dunia ketiga. Familisme di kasus Eropa Pertengahan dimaknai sebagai new social order yaitu dorongan psikologis bagi seseorang untuk eksis di wilayah publik sebagai birokrat maupun wilayah privat sebagai korporat-swasta. Pada kasus tersebut ekspresi berpolitik individu tidak akan kuat jika tidak melibatkan ikatan kekeluargaan di dalamnya. Namun demikian ekspresi berpolitik tersebut diarahkan untuk mengartikulasikan ide-ide dalam membangun masyarakat dan bukan untuk mengamankan status quo. Atau diarahkan sebagai perilaku menjaga moral daripada mengejar kekuasaan. Sedangkan di negara-negara dunia ketiga, familisme merupakan usaha untuk mengembangkan sikap favoritisme, nepotisme, seksionalisme, maupun regionalisme yang dimotivasi semangat

untuk menjaga dan meraih kepentingan secara kolektif (Djati : 2013).

Djati membagi preferensi familisme dalam dinasti politik lokal menjadi : pertama, populism dynasties atau dinasti politik familisme berbasis populisme yaitu upaya “mengamankan” status quo dalam proses suksesi pemerintahan melalui reproduksi wacana heroisme dan populisme progam pemerintahan sebelumnya. Kedua, octopussy dynasties, yaitu dinasti politik familisme berbasis jaringan kuasa. Mengutip Syarif Hidayat, Djati mengatakan salah satu contoh praktek *octopussy dynasties* adalah Banten yaitu proses suksesi pemerintahan yang terbangun atas koalisi klan politik, monopoli ekonomi, kekerasan, dan sebagainya. Praktek ini mirip tentakel gurita yang menjalar ke berbagai arah guna memposisikan kroni maupun keluarganya masuk ke berbagai posisi jabatan politik dengan tujuan meningkatkan soliditas dan solidaritas masyarakat. Ketiga, *tribalism dynasties* yaitu dinasti politik familisme berbasis kesukuan, marga, dan kekeluargaan atau. Keempat, feudalism dynasties, dinasti politik familisme berbasis sejarah atau bekas kerajaan (Djati : 2013).

Beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa politik dinasti yang ada di Indonesia memberikan gambaran bahwa dengan membawa nama besar tokoh keluarga, jaringan politik yang telah dibangun anggota dinasti politik menunjukkan kontestasi

politik di dalam tubuh keluarga sebagai bukti nyata bahwa keluarganya memiliki kekuatan dan kemampuan berpolitik di negerinya sendiri.

2. Regulasi Pilkada Mengenai Dinasti Politik

Pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 2005 menandai era baru demokrasi lokal pasca reformasi dengan diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun dalam realitasnya pilkada langsung yang diharapkan bisa memperkuat proses demokratisasi di tingkat lokal diwarnai berbagai praktek yang bertolak belakang dengan tujuan tersebut salah satunya lahirnya dinasti politik seperti yang terjadi di Kutai Negara, Bangkalan, Banten, maupun beberapa daerah lainnya. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sejak pilkada langsung yang digelar tahun 2005 hingga 2014 ditemukan setidaknya 59 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih memiliki hubungan darah kekeluargaan (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020).

Pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Salah aspek

yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah upaya membendung praktek dinasti politik dalam pilkada langsung. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :” salah satunya huruf q “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana “(UU No 1 Tahun 2015). Kemudian Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota juga mengatur persyaratan calon kepala daerah yang salah satunya tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (UU No 8 Tahun 2015). Namun regulasi yang berupaya membatasi praktek dinasti politik tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No.33/PUU/XIII/2015 karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan larangan tersebut diskriminatif terhadap hak politik warga negara untuk bisa berkontestasi politik dalam pilkada (Azzahra dan Sukri : 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi itu tentu saja memupus harapan publik terkait pembatasan praktek dinasti politik dalam penyelenggaraan pilkada langsung di Indonesia. Pasca putusan tersebut jumlah pasangan pilkada yang

terindikasi politik dinasti semakin marak dalam kontestasi pilkada yang dilaksanakan secara serentak sejak 2015. Pada tahun 2015 tercatat ada 34 pasangan kandidat yang terindikasi dinasti politik yaitu 1 dalam pilgub dan 31 dalam kontestasi pilbup/pilwalkot, 2 jalur independen. Kemudian pilkada serentak 2017 ada 12 pasangan terdiri 2 dalam pilgub dan 10 pilbup/pilwalkot. Pilkada serentak 2018 ada 13 pasangan terdiri dari 7 pilgub dan 6 pilbup/pilwalkot (Fitriyah : 2020). Sementara itu dalam catatan Riset Nagara Institute menunjukkan pasca putusan MK pada pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan 2018 telah melahirkan setidaknya 86 kepala daerah yang terindikasi dinasti politik (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020).

3. Praktek Dinasti Politik Pada Pilkada Jateng 2020

Praktek dinasti politik juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah salah satunya pada tahun 2020. Pilkada serentak Jawa Tengah tahun 2020 digelar 9 Desember 2020 di 21 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pekalongan, Klaten, Pemasang, Blora, Rembang, Purworejo, Wonogiri, Kendal, Demak, Semarang, Purbalingga, Sukoharjo, Wonosobo, Grobogan, Kebumen, Boyolali, Sragen serta Kota Surakarta, Magelang, Semarang dan Pekalongan. Dari 21 kabupaten/kota tersebut berdasarkan penelitian Nagara Institute terdapat 10 kandidat yang menunjukkan indikasi

dinasti politik yaitu Umi Kulsum, Bintang Narsasi, Etik Suryani, Ristawati Purwaningsih, Sri Mulyani, Hevearita, dan Gibran (Fadhillah, Zaini Makarim Supriyatno, Dyah Ramadhan, dan Dewa: 2020). Hayuning Pratiwi, Mochamad Hanies,

Tabel 1.1 Daftar Kandidat Kepala Daerah yang terindikasi terkait dinasti politik

Nama	Kandidat Kepala/Wakil Kepala Daerah	Kabupaten/Kota	Kaitan dengan Dinasti Politik
Umi Kulsum	Bupati	Kab.Blora	Istri Bupati Blora Joko Nugroho periode 2010-2015 dan 2016-2021
Ristawati Purwaningsih	Wakil Bupati	Kab. Kebumen	Istri Ketua DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019
Sri Mulyani	Bupati	Kab.Klaten	Bupati petahana dan merupakan istri Bupati Klaten Sunarna periode 2005-2020 dan 2010-2015.
Zaini Makarim Supriyatno	Wakil Bupati	Kab. Purbalingga	Adik Ipar Gubernur Jawa Tengah 2018-2023 Ganjar Pranowo
Dyah Hayuning Pratiwi	Bupati	Kab.Purbalingga	Anak dari Bupati Purbalingga periode 2000-2005 dan 2005-2010 serta Plt. Gubernur Kaltara 2015-2016 serta kakak dari Dyah Handayani Nastiti anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2014-2019.
Mochamad Hanies Cholil Barro	Wakil Bupati	Kab.Rembang	Adik Yaqut Cholil Qoumas anggota DPR RI periode 2019-2014 dan Wakil Bupati Rembang Periode 2005-2010.
Bintang Narsasi	Bupati	Kab. Semarang	Istri Bupati Kabupaten Semarang periode 2015 - 2020 Munjirin serta ibu dari Biena Munawa Hatta anggota DPRD Kabupaten Semarang 2019-2024.
Etik Suryani	Bupati	Kab. Sukoharjo	Istri Bupati Sukoharjo periode 2016-2021 Wardaya Wijaya
Hevearita Gunaryanti Rahayu	Wakil Walikota	Kota Semarang	Istri Alwin Basri Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019 - 2024

Gibran Rakabuming Raka	Walikota	Kota Surakarta	Anak dari Presiden RI 2014-2019 dan 2019-2024 Joko Widodo dan mantan Walikota Solo periode 2005-2010 dan 2010-2015.
------------------------	----------	----------------	---

Sumber : diolah dari hasil riset Nagara Institute (Fadhillah, Ramadhan, dan Dewa: 2020).

Sementara itu dalam pengamatan penulis ada dua kandidat lain yang sebenarnya memiliki hubungan dinasti politik pada pilkada serentak Jawa Tengah 2020 namun terlewatkan oleh riset Nagara Institute yaitu Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Agung Mukti Wibowo. Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang maju sebagai petahana dalam pilbup Sragen 2020. Yuni Sukowati merupakan anak Bupati

Sragen Untung Wiyono pada 2001-2011. Kemudian Agung Mukti Wibowo yang maju dalam pilbup Pemalang 2020. Agung sendiri pernah menjabat wakil bupati Pemalang 2011-2016 dan merupakan adik Idza Priyanti masih menjabat sebagai Bupati Brebes periode 2012-2017 dan 2017-2022 serta kakak dari Ikmal Jaya yang pernah menjabat sebagai walikota Tegal 2008-2013.

Tabel 1.2 Daftar Kandidat Kepala Daerah Lainnya yang Terindikasi Terkait Dinasti Politik

Nama	Kandidat Kepala/Wakil Kepala Daerah	Kabupaten/Kota	Kaitan dengan Dinasti Politik
Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Bupati	Kab. Sragen	Anak Bupati Sragen Untung Wiyono 2001-2011
Agung Mukti Wibowo	Bupati	Kab. Pemalang	Adik Bupati Brebes Idza Priyanti 2012-2017 dan 2017-2022 serta kakak dari Walikota Tegal Ikmal Jaya 2008-2013.

Sumber : diolah penulis

Dengan demikian menurut penulis total ada 12 kandidat yang terindikasi memiliki relasi dengan dinasti politik pada pilkada serentak Jawa Tengah tahun 2020. Dari ke dua belas kandidat tersebut mayoritas lebih bersifat populism dynasties. Para kandidat berusaha mempertahankan” status quo” dalam proses suksesi politik dengan mereproduksi wacana heroisme maupun populisme pemerintahan

sebelumnya yang dijalankan oleh kerabat baik, suami atau ayah atau ibu. Hal ini dilakukan seperti majunya Umi Kulsum, Sri Mulyani, Dyah Hayuning Pratiwi, Bintang Narsasi, Etik Suryani termasuk Gibran Rakabumingraka dalam kontestasi pilkada Jateng 2020. Empat kandidat yaitu Umi Kulsum, Sri Mulyani, Bintang Narsasi, dan Etik Suryani ingin meneruskan kekuasaan politik suaminya sebagai kepala daerah.

Sementara tiga kandidat yaitu Dyah Hayuning Pratiwi, Yuni Sukowati dan Gibran ingin mengulang romantisme kekuasaan sang ayahandanya yang pernah menjabat kepala daerah. Khusus untuk Gibran selain romantisme kepemimpinan Jokowi yang pernah menjabat Walikota Surakarta juga populisme Jokowi yang sedang menjabat Presiden Republik Indonesia.

Sementara kandidat lainnya seperti Ristawati Purwaningsih, Zaini Makarim Suprayitno, Mochamad Hannies, Hevarita Gunaryati Rahayu maupun Agung Mukti Wibowo keikutsertaannya dalam kontestasi pilkada Jateng 2020 lebih bisa dikategorikan sebagai octopussy dynasties meskipun dengan kadar yang berbeda dengan yang pernah terjadi di Provinsi Banten yang menggurita. Praktek octopussy dynasties ini lebih pada dinasti politik yang berbasis jaringan kuasa keluarga yang menduduki jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif. Misal Zaini Makarim yang merupakan adik ipar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Kemudian Ristawati, Mochamad Hannies dan Hevarita yang memiliki suami atau kerabat yang menduduki jabatan di legislatif dan kemudian berusaha melebarkan sayap politik di ranah kepala daerah atau wakil kepala daerah. Sementara Agung Mukti Wibowo berbasis jaringan klan politik keluarga Dewi Sri sebuah nama perusahaan bus yang terkemuka di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa. Klan keluarga tersebut sebelumnya telah

sukses memposisikan beberapa anggota keluarganya sebagai kepala daerah yaitu Ikmal Jaya yang menjadi Walikota Tegal serta Idza Priyanti yang menjadi Bupati Brebes dua periode.

Dari praktek dinasti politik yang berlangsung pada pilkada serentak Jateng 2020 setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor kelembagaan terkait dengan keputusan MK No.33/PUU/XIII/2015 yang membatalkan regulasi terkait pembatasan atau pengaturan praktek dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. Keputusan MK tersebut telah melegitimasi terbukanya praktek dinasti politik dalam kontestasi pilkada serentak di Indonesia. Imbasnya kepala daerah yang sedang berkuasa dan memiliki naluri kekuasaan untuk mempertahankan status quo akan berusaha mewariskan kekuasaannya kepada kerabatnya baik istri, suami atau anak. Hal ini bisa mendorong penyalahgunaan jabatan semasa menjabat demi kepentingan lancarnya proses regenerasi politik keluarganya. Kedua, Macetnya proses kaderisasi di partai politik. Arena kontestasi politik dalam pilkada seharusnya menjadi sarana partai politik untuk melakukan proses rekrutmen politik dengan menyeleksi kader-kader terbaiknya untuk maju dalam kontestasi. Namun mayoritas partai politik lebih bersikap pragmatis dengan menanggalkan proses kaderisasi dan lebih mengedepankan pragmatisme dalam proses kandidasi pilkada. Partai tidak segan mendukung penuh kandidat meskipun terkait

dengan praktek dinasti politik dalam pilkada. Ketiga, sikap politik masyarakat yang terlalu permisif terhadap praktek dinasti politik dalam pilkada. Populisme dan romantisme kepemimpinan seorang kepala daerah lebih menjadi pertimbangan masyarakat dalam mendukung praktek dinasti politik daripada efek negatifnya. Hal ini terlihat dari dua belas kandidat yang terkait dinasti politik pada kontestasi pilkada serentak Jawa Tengah 2020 hanya tiga kandidat yang mengalami kekalahan yaitu Umi Kulsum, Bintang Narsasi dan Zaini Makarim. Sementara sembilan kandidat lainnya berhasil memenangkan kontestasi pilkada. Ini mengindikasikan bahwa dinasti politik ternyata belum atau tidak menjadi salah satu isu yang ditolak dan tidak menjadi pertimbangan untuk tidak memilih kandidat di masyarakat terlepas dari sisi buruknya terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Praktek dinasti politik pada pilkada serentak di Indonesia terus berlangsung dan ada kecenderungan meningkat secara kuantitatif. Di Provinsi Jawa Tengah pada pilkada serentak 2020 setidaknya ada 12 kandidat yang memiliki hubungan dengan dinasti politik. Ke-12 kandidat tersebut secara umum bisa dikategorikan ke dalam dua jenis praktek dinasti politik. Pertama, populism dynasties, yaitu upaya melanggengkan ” status quo” kekuasaan dengan cara mereproduksi

wacana heroisme maupun populisme pemerintahan sebelumnya yang memiliki hubungan kerabat baik dan merupakan suami atau ayah kandidat. Kedua, octopussy dynasties yaitu upaya membangun dinasti politik berbasis jaringan kuasa keluarga yang telah menduduki jabatan-jabatan penting di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Maraknya praktek dinasti politik pada Pilkada Jateng 2020 tidak lepas dari tiga faktor . Pertama, faktor kelembagaan terkait putusan MK No.33/PUU/XIII/2015 yang kemudian seakan-akan melegitimasi dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. Kedua, faktor kaderisasi partai politik yang cenderung gagal dan sikap partai yang pragmatis, serta, ketiga, sikap permisif masyarakat terhadap praktek dinasti politik dalam pilkada yang berkontribusi terhadap kemenangan kandidat yang terindikasi dinasti politik.

Dinasti politik dalam pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia nampaknya akan terus berlangsung ke depannya sampai munculnya *political will* dari pemerintah maupun DPR untuk membuat regulasi baru untuk membatasi praktek dinasti politik. Dalam konteks ini, perlu adanya aturan yang tegas untuk mengatur pembatasan kekuasaan dan masa jabatan. Di sisi lain juga perlu adanya kesepahaman para hakim Mahkamah Konstitusi terkait regulasi pembatasan dan pengaturan praktek dinasti politik yang bertujuan untuk melindungi

demokrasi lokal dan bukannya untuk melarang hak berpolitik seseorang untuk berkontestasi dalam pilkada

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dedi. (2022). *Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi*, Jurnal MODERAT, Volume 8, Nomor 1, hal. 92-101. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2596/1959>
- Agustino,L, (2010). *Dinasti Politik Pasca-Otonomi Orde Baru: Pengalaman Banten*, Jurnal Prisma, Vol. 29, No. 3, hal.102-116. <https://www.prismajurnal.com/edition/4>
- Azzahra, F. dan Sukri,I.F. (2022). "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Persimpangan Antara Hak Asasi dan Demokrasi," *Jurnal APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, hal. 105-119 . <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/27>
- Djati,W.R. (2013). "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di aras Lokal," Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, Vol.18, No.2, hal. 203-231. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1681136>
- Fadhillah,D. N., Ramadhan,F. dan Dewa,T.T (2020). *Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Nagara Institute, Jakarta.
- Fitriyah (2020). "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)." *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.11, No. 1, hal. 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Moeloeng, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Moh. Nizar dan Wais Alqarni. (2021). *Book Series: Demokrasi Dan Otonomi Daerah (Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal)*. Syiah Kuala University Press: Aceh.
- Pemerintah Indonesia. 2015. *Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2016. *Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*

*tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.* Sekretariat Negara.
Jakarta.

Society, Vol. 1, No. 2, hal 113-
114.

Susanti, M.H. (2017). "Dinasti Politik
dalam Pilkada di Indonesia,"
Journal of Government and Civil

Syauket, A. (2021). *Membangun Dinasti
Politik Oligarkhi Yang Korup :
Fenomena Pilkada Serentak
2020*. Penerbit Kreasi Cendekia
Pustaka, Jakarta.